



PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS DI LINGKUNGAN MADRASAH ISLAMIAH

Ijudin*

Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengembangan pendidikan kejuruan jenjang SMA di lingkungan Madrasah Islamiah. Metodologi pembahasan yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis kasual efekual. Adapun kesimpulan berdasarkan hasil pembahasan bahwa: pendidikan harus mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam menjalani kehidupan; menumbuhkan etos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur; sehingga pendidikan perlu didesain agar mampu menjawab tantangan masyarakat agar menuju masyarakat madani serta lentur pada perubahan zaman dan masyarakat.

Kata Kunci: Pendidikan Kejuruan, Madrasah Islamiah

1 Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender. Pemerataan dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki keterampilan hidup (*life skill*), sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila (Depdiknas, 2006:1).

Upaya pemerintah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya sudah dilakukan dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) I – V, kemudian ditetapkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan sekarang sudah ditetapkannya Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Semua ini menjadi pedoman bagi semua tingkatan pengelola pendidikan, mulai dari pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan satuan pendidikan, untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan pendidikan nasional.

**Ijudin, S.Ag, M.Si adalah salah satu dosen sekaligus beliau menjabat sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Pendidikan Islam dan Keguruan Universitas Garut*

Kemudian pada tahun 2005, Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 7 tentang RPJMN Tahun 2004-2009 yang mengamanatkan tiga misi pembangunan nasional, yaitu: 1) Mewujudkan negara Indonesia yang aman dan damai; 2) Mewujudkan bangsa Indonesia yang adil dan demokratis; dan 3) Mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera. Untuk mewujudkannya, bangsa kita harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, sehingga setiap warga negara mampu meningkatkan kualitas hidup, produktivitas dan daya saing terhadap bangsa lain di era global.

Berbicara mengenai pembangunan negara, berarti melibatkan diri dengan kebutuhan akan tenaga pembangunan, tenaga kerja dan bagaimana caranya memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu usaha dalam memenuhi kebutuhan tersebut, akhir-akhir ini pemerintah telah menetapkan suatu program pendidikan kejuruan dalam rangka penguatan pendidikan vokasional baik melalui sekolah/madrasah umum maupun sekolah/madrasah kejuruan dan pendidikan non-formal guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Pendidikan menengah kejuruan sebagai salah satu sub sistem dari sistem pendidikan nasional mempunyai fungsi untuk membentuk manusia pembangunan yang bermoral Pancasila. Dan sebagai sub sistem dari sistem pembangunan nasional mempunyai fungsi untuk mempersiapkan tenaga kerja yang terampil, terlatih dan terdidik. Oleh karena itu, inti dan orientasi sistem pendidikan menengah kejuruan bertujuan menghasilkan tenaga untuk dunia usaha dan industri serta selalu menitikberatkan pada kesesuaian dan keperluan maupun jenjang tugas masing-masing dalam masyarakat. Dengan demikian, fungsi dan peranan pendidikan menengah kejuruan yaitu untuk menghasilkan tenaga pembangunan yang memiliki keahlian, yang dapat mengerjakan tugas dengan cepat, tepat dan cermat, serta mampu mengubah sifat dari manusia prestise atau gengsi menjadi manusia prestasi (Jusuf Enoch, 1992:250).

Namun demikian, dewasa ini banyak lontaran kritik terhadap sistem pendidikan yang pada dasarnya mengatakan bahwa perluasan kesempatan belajar cenderung telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik daripada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Kritik ini tentu saja beralasan, karena data sensus penduduk memperlihatkan kecenderungan yang menarik bahwa proporsi jumlah tenaga penganggur lulusan pendidikan yang lebih tinggi ternyata lebih besar dibandingkan dengan proporsi penganggur dari lulusan pendidikan yang lebih rendah (Sensus Penduduk, 1999). Artinya bahwa persentase jumlah penganggur tenaga sarjana lebih besar dibandingkan dengan persentase jumlah penganggur lulusan SMA atau jenjang pendidikan lebih rendah.

Madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan nasional dan satuan pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan cita-cita dan misi pembangunan nasional tersebut, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pada saat yang sama, madrasah juga harus mampu menjawab tantangan dan tuntutan pendidikan sekarang dalam konteks ketersesuaian antara pendidikan dan kebutuhan lapangan kerja melalui pengembangan pendidikan kejuruan/vokasional di lingkungan madrasah Islamiah.

Tulisan ini paling tidak memberikan harapan tentang bagaimana lembaga pendidikan, khususnya madrasah mampu mengembangkan pendidikan kejuruan untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dalam konteks pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembaharuan sistem pendidikan Islam.

2 Kerangka Berfikir

Belakangan ini dunia pendidikan mengalami perkembangan yang luar biasa pesatnya, termasuk di Indonesia. Olive Banks seperti yang dikutip Sudardja Adiwikarta (1988:41) menamakannya dengan "*explosion of education*" atau ledakan pendidikan. Perkembangan luar biasa itu terjadi dalam berbagai lingkup pendidikan seperti pertumbuhan dalam jumlah sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi, perpanjangan jangka waktu pendidikan formal, perluasan dan pendalaman kurikulum, bahkan perkembangan sikap positif di kalangan warga masyarakat terhadap pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal dan nonformal. Sementara itu, di pihak lain terdapat pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan spesialisasi yang semakin tajam, penerapan teknologi yang semakin canggih di bidang industri dan bidang kehidupan lain, tumbuhnya lapangan kerja baru yang lebih memerlukan keahlian, serta manajemen dan kemahiran berfikir.

Pertanyaannya adalah apakah gejala-gejala pendidikan tersebut merupakan faktor penentu dalam menunjang pertumbuhan ekonomi? Pertanyaan ini masih belum dapat dijawab dengan tuntas dalam penelitian-penelitian yang sudah dilakukan. Peranan pendidikan dalam pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) memang tidak perlu diragukan. Yang menjadi pertanyaan ialah, apakah pengembangan sumber daya manusia tersebut selalu harus dilakukan melalui pendidikan formal? Pertanyaan yang lebih khusus ialah program pendidikan formal yang bagaimana yang mampu mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM), agar menjadi modal dasar pembangunan yang berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat relevan dengan isu kebijakan pendidikan yang sedang disorot saat ini.

Titik singgung antar pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ialah produktivitas tenaga kerja, dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat. Anggapan ini diperoleh dari suatu teori yang dinamakan teori *Human Capital*. Teori ini menerangkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena pendidikan berperan di dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Teori ini merasa yakin bahwa jika setiap individu memiliki penghasilan yang tinggi karena pendidikannya juga tinggi, pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat ditunjang karenanya. Teori *Human Capital* ini menganggap bahwa pendidikan formal merupakan suatu investasi, baik bagi individu maupun bagi masyarakat. Dari teori ini timbul beberapa model untuk mengukur keberhasilan pendidikan bagi pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan menggunakan teknik *cost benefit analysis*, model pendidikan dan tenaga kerja, dan sebagainya (Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, 1993:135).

Di samping itu, para penganut *teori konsensus* dan penganut *teori konflik* sepakat bahwa fungsi utama institusi pendidikan dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi ini adalah mempersiapkan pemuda-pemuda untuk mengisi lapangan kerja produktif (Parelius, 1978:50). Dalam hal mengenai pendidikan orang dewasa, tujuan yang hendak dicapai tentu bukan lagi mempersiapkan kemampuan, melainkan meningkatkannya agar peserta didik dapat mampu menghadapi permasalahan yang ada pada saat itu (Knowles, 1982:53). Untuk itu mereka mendapat pendidikan mental, sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat. Proses tersebut terjadi pada masyarakat mulai dari yang paling tradisional sampai kepada yang paling modern (Sudardja Adiwikarta, 1988:42).

Berikut ini data mengenai keterkaitan antara kualitas pendidikan dengan kualitas kehidupan ekonomi.

Tabel 1
Persentase Enrolmen Sekolah Menengah di Negara Kaya dan Miskin
Tahun 1950, 1960 dan 1970

Tahun	Negara Miskin (%)	Negara Kaya (%)
1950	5	20.5
1960	9	36
1970	16	46

Sumber : Sudardja Adiwikarta, Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan dengan Masyarakat, Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988, hlm. 42

3 Pendidikan Islam dan Perubahan

Pendidikan merupakan sistem dan cara meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan manusia dalam sejarah umat manusia, hampir tidak ada kelompok manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya sekalipun dalam masyarakat yang masih terbelakang (primitif). Pendidikan sebagai usaha sadar yang dibutuhkan untuk menyiapkan anak manusia demi menunjang perannya di masa yang akan datang. Upaya pendidikan yang dilakukan oleh suatu bangsa tentu memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan rekayasa bangsa di masa yang akan datang, karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan asasi manusia, bahkan M. Natsir menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan maju mundurnya kehidupan masyarakat tersebut (M. Natsir, 1973:77). Pernyataan M. Natsir di atas merupakan indikasi tentang urgensi pendidikan bagi kehidupan manusia, karena pendidikan itu sendiri mempunyai peranan sentral dalam mendorong individu dan masyarakat untuk meningkatkan kualitasnya dalam segala aspek kehidupan demi mencapai kemajuan untuk menunjang perannya di masa datang. Hal ini terbukti dalam kehidupan sekarang, pendidikan tampil dengan daya pengaruh yang sangat besar dan menjadi variabel pokok masa depan manusia.

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia yang sekaligus membedakan manusia dengan hewan. Hewan juga "belajar", tetapi lebih ditentukan oleh instink, sedangkan bagi manusia, belajar berarti rangkaian kegiatan menuju "pendewasaan" guna menuju kehidupan yang lebih berarti. Oleh karena itu, berbagai pandangan yang menyatakan bahwa pendidikan itu merupakan proses budaya untuk mengangkat harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat (*life long education*). Apabila demikian, maka pendidikan memegang peran yang menentukan eksistensi dan perkembangan manusia, "karena pendidikan merupakan usaha melestarikan dan mengalihkan serta mentransformasikan nilai-nilai kebudayaan dalam segala aspeknya dan jenisnya kepada generasi penerus" untuk mengangkat harkat dan martabat manusia (M. Rusli Karim, 1991:27).

Mengingat pendidikan merupakan kebutuhan penting bagi setiap manusia, negara dan maupun pemerintah, maka pendidikan harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistematis oleh para pembuat kebijakan yang berwenang di Republik ini. Berangkat dari kerangka ini, maka upaya pendidikan yang dilakukan suatu bangsa selalu memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa bangsa tersebut di masa mendatang, sebab pendidikan selalu dihadapkan pada perubahan, baik perubahan zaman maupun perubahan masyarakat. Oleh karena itu, mau tidak

mau pendidikan harus didesain mengikuti irama perubahan tersebut, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan, maka tuntutan pembaharuan sistem pendidikan Islam menjadi suatu keharusan dan pembaharuan sistem pendidikan Islam selalu mengikuti dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, baik pada konsep, kurikulum, proses, fungsi, tujuan, manajemen lembaga-lembaga pendidikan, dan sumber daya pengelola pendidikan.

Mencermati konsep pembaharuan sistem pendidikan Islam di atas, pembaharuan pendidikan merupakan suatu usaha atau proses multidimensional yang kompleks, dan tidak hanya bertujuan untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dirasakan, tetapi terutama merupakan suatu usaha penelaahan kembali atas aspek-aspek sistem pendidikan yang berorientasi pada rumusan tujuan yang baru, dan selalu berorientasi pada perubahan masyarakat. Upaya pembaharuan pendidikan tidak akan memiliki ujung akhir sampai kapan pun. Mengapa demikian, karena persoalan pendidikan selalu saja ada selama peradaban dan kehidupan manusia itu sendiri masih ada, pembaharuan sistem pendidikan Islam tidak akan pernah dapat diakhiri, apalagi dalam abad informasi saat ini.

Pembaharuan sistem pendidikan Islam terjadi kerana adanya tantangan kebutuhan masyarakat pada saat itu dan pendidikan itu sendiri diharapkan dapat menyiapkan produk manusia yang mampu mengatasi kebutuhan manusia tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan itu bersifat konservatif. Misalnya, pada masyarakat agraris pendidikan didesain agar relevan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada era tersebut, begitu pula apabila perubahan masyarakat menjadi masyarakat industrial dan informasi, pendidikan juga didesain mengikuti irama perkembangan masyarakat industri dan informasi dan seterusnya.

Demikian siklus perkembangan perubahan pendidikan, kalau tidak pendidikan akan ketinggalan dari perubahan zaman yang begitu cepat. Sebagai ilustrasi, pada saat Amerika mengejar kemajuan teknologi ruang angkasa Rusia, maka pada saat itu pendidikannya ditekankan pada IPTEK. Demikian pula pada saat Amerika mengejar kemajuan ekonomi Jepang dan Jerman, maka pada saat itu pendidikannya ditekankan pada bidang ekonomi. Dan akhir-akhir ini, ketika dirasakan lemahnya integrasi bangsa Amerika, maka pendidikan ditekankan untuk membangun integrasi bangsa (sizer,1992). Dengan indikator tersebut akan menjadi lebih mudah mengidentifikasi krisis pendidikan yang terjadi dengan didasarkan pada indikator yang diukur dari tidak tercapainya tujuan tekanan pendidikan itu (Anas Syhrul dan M. Fadhilah Zaidie, 1999:29). Ketika dunia menghadapi gerakan globalisasi, Amerika Serikat, dalam dokumen Amerika 2000: *An Education Strategy*, terdapat enam tujuan pendidikan nasional Amerika Serikat, salah satunya bahwa Amerika Serikat menginginkan memiliki pengaruh secara global. Untuk mencapai cita-cita itu, pendidikan nasional diformulasikan sebagai: *US Students Will be First in the World in science and mathematics achievement* (Suyanto dan Djihad Hisyam, 22). dengan demikian Amerika Serikat dalam strategi pendidikannya menginginkan mahasiswa dan para pelajarnya memiliki prestasi yang unggul di dunia dalam hal menguasai "ilmu pengetahuan" dan "matematika".

4 Kondisi Pendidikan Islam di Indonesia

Kondisi pendidikan Islam di Indonesia sebenarnya menghadapi nasib yang sama, dan secara khusus pendidikan Islam menghadapi berbagai persoalan dan kesenjangan dalam berbagai aspek yang lebih kompleks yaitu: berupa persoalan dikotomi pendidikan, kurikulum, tujuan, sumber daya, serta manajemen pendidikan Islam. Upaya perbaikannya belum dilakukan secara mendasar, sehingga terkesan seadanya saja. Usaha pembaharuan dan peningkatan pendidikan Islam sering bersifat sepotong-sepotong atau tidak komprehensif dan menyeluruh serta sebagian besar sistem

dan lembaga pendidikan Islam belum dikelola secara profesional. Usaha pembaharuan pendidikan Islam secara mendasar selalu dihambat oleh berbagai masalah, mulai dari persoalan dana sampai tenaga ahli, sehingga pendidikan Islam dewasa ini terlihat orientasinya yang semakin kurang jelas. Dengan kenyataan ini, maka sebenarnya sistem pendidikan Islam haruslah senantiasa mengorientasi diri untuk menjawab kebutuhan dan tantangan yang muncul dalam masyarakat kita sebagai konsekuensi logis dari perubahan.

Pada era reformasi ini, pendidikan nasional ditegaskan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang mempunyai identitas berdasarkan budaya Indonesia. Untuk mencapai cita-cita tersebut, pendidikan hendaknya didasarkan pada paradigma-paradigma baru yang bertujuan untuk membentuk suatu masyarakat Indonesia yang demokratis. Pendidikan harus bertolak dari pengembangan manusia Indonesia yang berbudaya dan berperadaban, merdeka, bertaqwa, bermoral dan berakhlak, berpengetahuan dan berketerampilan, informatif dan kompetitif, sehingga dapat berkarya secara profesional dalam kehidupan global menuju masyarakat madani Indonesia. Saat ini, pemerintah telah menetapkan tiga pilar kebijakan pendidikan, yaitu: (1) Upaya pemerataan dan perluasan akses pendidikan; (2) Peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing keluaran pendidikan; dan (3) Peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik pengelolaan pendidikan (Depdiknas, 2006:15). Dengan ketiga pilar kebijakan ini, sebenarnya dapat meyakinkan bahwa pendidikan nasional dan pendidikan Islam kita secara makro cukup menjanjikan bagi penyediaan sumber daya manusia yang benar-benar memiliki keunggulan kompetitif. Tetapi apabila melihat kenyataan kondisi pendidikan sekarang ada dua alasan pokok perlu dilakukan dalam pembaharuan sistem pendidikan Islam di Indonesia, yaitu: *Pertama*, konsepsi dan praktik pendidikan Islam sebagaimana tercermin pada kelembagaannya dan isi programnya didasarkan pada konsep atau pengertian pendidikan Islam yang sempit yang terlalu menekankan pada kepentingan Akhirat. *Kedua*, lembaga-lembaga dan isi pendidikan Islam yang dikenal sekarang ini, seperti madrasah dan pesantren, tidak atau kurang mampu memenuhi kebutuhan umat Islam dalam menghadapi tantangan dunia modern, terutama masyarakat dan bangsa Indonesia bagi pembangunan di segala bidang, di masa sekarang dan di masa yang akan datang.

Untuk menghadapi dan membangun sumber daya manusia Indonesia, diperlukan usaha pembaharuan sistem pendidikan Islam secara mendasar yaitu: (1) Perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia terutama pada fitrah atau potensi; (Anwar Jasim, 1985:7-8). (2) Pendidikan Islam harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena dalam pandangan Islam, bahwa ilmu pengetahuan adalah satu, yaitu yang berasal dari Allah SWT; (3) Pendidikan didesain menuju tercapainya sikap dan perilaku "toleransi", lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran terhadap perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsip yang diyakininya; (4) Pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam menjalani kehidupan; (5) Pendidikan yang menumbuhkan etos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur; (6) Pendidikan Islam perlu didesain agar mampu menjawab tantangan masyarakat agar menuju masyarakat madani serta lentur pada perubahan zaman dan masyarakat.

Dalam pembahasan di atas, ada beberapa indikator sebagai usaha pembaharuan sistem pendidikan Islam, yaitu: *setting* pendidikan, lingkungan pendidikan, karakteristik pembaharuan, dan kurikulum yang disajikan sesuai dengan karakteristik tujuan. Perlu diketahui bahwa suatu usaha pembaharuan sistem pendidikan dapat terarah dengan baik apabila didasarkan pada kerangka dasar filsafat dan teori pendidikan yang mantap. Filsafat pendidikan hanya dapat dikembangkan

berdasarkan asumsi-asumsi dasar yang kokoh dan jelas tentang manusia, baik sebagai individu atau sebagai anggota masyarakat, hubungannya dengan lingkungan, alam semesta, akhirnya dan hubungannya dengan Maha Pencipta, sedangkan teori pendidikan dapat dikembangkan atas dasar pertemuan antara pendekatan Filososis dan pendekatan empiris. Dengan demikian, kerangka dasar pertama pembaharuan pendidikan Islam adalah "Konsepsi filosofis" dan "teori pendidikan" yang didasarkan pada asumsi-asumsi tentang manusia yang hubungannya dengan masyarakat, lingkungan dan ajaran Islam.

Langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan sistem pendidikan adalah merumuskan "kerangka dasar filosofis pendidikan" yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkan secara "empiris" prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam konteks lingkungan (sosial dan kultural). Tanpa kerangka dasar "filosofis" dan "teoritis" yang kuat maka pembaharuan sistem pendidikan Islam tidak punya pondasi yang kuat dan juga tidak memiliki arah yang pasti. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengembangkan kerangka dasar sistematis, yaitu kerangka dasar filosofis dan teoritis pendidikan Islam harus ditempatkan dalam konteks supra-sistem masyarakat, bangsa dan negara serta kepentingan umat dimana pendidikan itu diterapkan. Apabila terlepas dari konteks ini, pendidikan akan menjadi tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam menghadapi tuntutan perubahan menuju masyarakat Indonesia yang berperadaban.

Kebutuhan umat Islam Indonesia pada era reformasi ini sangat mendesak, yaitu bagaimana meningkatkan kualitas untuk menghaadapi perubahan menuju masyarakat muslim. Jawabannya, adalah kualitas pendidikan harus disiapkan dan diupayakan, perlu dirumuskan visi dan misi pendidikan yang baru untuk membangun serta meningkatkan mutu dan kualitas manusia dan masyarakat muslim. Apabila tidak melakukan perubahan, pendidikan Islam akan tetap "terbelakang" dan tidak mampu bersaing dalam kehidupan masyarakat yang maju di Indonesia.

5 Peran Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Dalam Mengembangkan Pendidikan Kejuruan

Madrasah dalam khazanah kehidupan manusia Indonesia merupakan fenomena budaya yang usianya berkisar satu abad lebih; usia yang tentu tidak dapat dikatakan sebentar. Bahkan bukanlah suatu hal yang berlebihan bila dikatakan bahwa madrasah telah menjadi salah satu wujud dari entitas budaya Indonesia yang dengan sendirinya menjalani proses sosialisasi yang relatif intensif. Indikasinya adalah wujud entitas budaya ini telah diakui dan diterima kehadirannya, dan secara berangsur namun pasti telah memasuki arus utama pembangunan bangsa menjelang akhir abad ke-20. Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003), eksistensi madrasah disamakan atau disejajarkan dengan sekolah umum bahkan dikatakan sebagai sekolah plus bercirikan agama.

Kehadiran madrasah sebagai lembaga pedidikan Islam, setidak-tidaknya mempunyai empat latar belakang, yaitu: (1) Sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam; (2) Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan pendidikan yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan perolehan ijazah; (3) Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai pendidikan mereka. (Tim Depag RI. 1985:109).

(4) Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi.

Dalam pada itu, Ismail Raji Al-Faruqi berpendapat bahwa madrasah merupakan sistem pendidikan yang menggabungkan antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan modern (Barat). Dalam visi ini, madrasah mempunyai dua keuntungan dari kedua sistem tersebut, yaitu upaya menghilangkan kelemahan-kelemahan tiap sistem, dan adanya adaftifikasi metodologi dan ideal-ideal barat sekuler, serta adanya sumber pendidikan yang tidak hanya diperoleh dari dana waqap, tetapi juga dari pemerintah setempat, karena pemerintah menyetujui kebijakan-kebijakan baru yang telah diambil dan dilaksanakan oleh lembaga pendidikan madrasah tersebut (Ismail Raji Al-Faruqi, 1989:22).

Paling tidak ada tiga hal yang menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih suatu lembaga pendidikan yaitu: *Pertama*, cita-cita atau gambaran hidup masa depan. *Kedua*, nilai-nilai (agama). Dan *ketiga* adalah status sosial. Semakin terdidik suatu masyarakat, semakin banyak faktor yang dijadikan pertimbangan dalam memilih lembaga pendidikan, dan sebaliknya semakin awam suatu masyarakat, semakin sederhana pertimbangan dalam menentukan pilihannya pada suatu lembaga pendidikan.

Sehubungan dengan kemajuan pembangunan di berbagai sektor kehidupan telah membawa implikasi pada: tingkat pendidikan semakin baik dan seleksi yang semakin ketat terhadap kualitas sumber daya manusia lulusan lembaga pendidikan, maka konsekuensinya masyarakat akan semakin selektif dalam memilih dan memilah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan mana yang tidak menjanjikan apa-apa. Apalagi setelah terbukti, bahwa hanya lembaga pendidikan yang berkualitaslah yang melahirkan manusia-manusia yang dapat diandalkan cipta, karsa dan karyanya.

Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut di atas, lembaga pendidikan dituntut dapat menawarkan program-programnya secara cerdas berdasarkan kebutuhan kekinian dan kedisiplinan serta menjanjikan masa depan. Sehingga keberadaannya dapat fungsional baik bagi keperluan menciptakan dan mengembangkan ilmu-ilmu baru, lapangan kerja baru, membina sikap hidup kritis dan pola tingkah laku yang baru, serta kecenderungan-kecenderungan baru.

Sementara itu, pemerintah sebagai salah satu penanggung jawab utama di bidang pembangunan pendidikan nasional telah melakukan berbagai upaya untuk melaksanakan pembaharuan melalui perubahan-perubahan di berbagai aspek pendidikan, baik berupa perubahan struktural, perubahan isi, perubahan peran guru, kegiatan-kegiatan pendidikan dan pengelolaan sistem pendidikan (Conny R. Semiawan dan Soediarso dalam Malik Fadjar, 1998:60).

6 Penutup

Bahwa sejatinya eksistensi madrasah memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan bangsa khususnya dalam peningkatan kualitas manusia Indonesia baik dari aspek spiritual, moral, intelektual dan keterampilan (*skill*). Peran dan fungsi madrasah tersebut diperkuat oleh pengokohan kebijakan pemerintah dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 Pasal 18 ayat 3, bahwa Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

Beranjak dari posisi dan peran tersebut, maka madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peluang dan kesempatan untuk lebih menguatkan eksistensinya dengan

mengembangkan sekolah kejuruan atau vokasional guna mempersiapkan lulusan yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi untuk masuk ke dunia kerja.

Untuk mempersiapkan semua itu, maka dibutuhkan usaha pembaharuan sistem pendidikan Islam secara mendasar. Langkah awal yang harus dilakukan dalam melakukan perubahan sistem pendidikan Islam adalah merumuskan kerangka dasar filosofis pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam, kemudian mengembangkan secara empiris prinsip-prinsip yang mendasari keterlaksanaannya dalam konteks lingkungan (sosial dan kultural). Agenda pembaharuan tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu: (1) Perlu pemikiran kembali konsep pendidikan Islam yang betul-betul didasarkan pada asumsi dasar tentang manusia terutama pada fitrah atau potensi; (2) Pendidikan Islam harus menuju pada integritas antara ilmu agama dan ilmu umum untuk tidak melahirkan jurang pemisah antara ilmu agama dan ilmu bukan agama, karena dalam pandangan Islam, bahwa ilmu pengetahuan adalah satu, yaitu yang berasal dari Allah SWT; (3) Pendidikan didesain menuju tercapainya sikap dan perilaku "toleransi", lapang dada dalam berbagai hal dan bidang, terutama toleran terhadap perbedaan pendapat dan penafsiran ajaran Islam, tanpa melepaskan pendapat atau prinsip yang diyakininya; (4) Pendidikan yang mampu menumbuhkan kemampuan untuk berswadaya dan mandiri dalam menjalani kehidupan; (5) Pendidikan yang menumbuhkan etos kerja, mempunyai aspirasi pada kerja, disiplin dan jujur; (6) Pendidikan Islam perlu didesain agar mampu menjawab tantangan masyarakat agar menuju masyarakat madani serta lentur pada perubahan zaman dan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anwar Jasim, *Kerangka Dasar Pembaharuan Pendidikan Islam: Tinjauan Filosofis*, Jakarta 1985.
- Anas Syhrul dan M. Fadhilah Zaidie, *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia Sebuah Rekonstruksi Pemikiran Prof. Dr. Djohar MS.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan*, Terj. Anas Mahyuddin, Bandung : Pustaka, 1989.
- Jusuf Enoch, *Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.
- Malik Fadjar, *Visi Pembaruan Pendidikan Islam*, Jakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penyusunan Naskah Indonesia (LP3NI), 1998.
- M. Natsir, *Kapita Selecta*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- M. Rusli Karim, *Pendidikan Islam Sebagai Upaya Pembebasan Manusia*, dalam Muslih Usa (editor), *Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Rencana Strategis Pendidikan Nasional, Konferensi Nasional Revitalisasi Pendidikan*, Jakarta: Depdiknas, 2006.
- Suyanto dan Djihad Hisyam, *Refleksi dan Reformasi Pendidikan*.
- Sudardja Adiwikarta, *Sosiologi Pendidikan: Isyu dan Hipotesis Tentang Hubungan Pendidikan Dengan Masyarakat*, Jakarta: Depdikbud, 1988.
- Tim Depag RI., *Islam untuk Disiplin Ilmu Pendidikan*, Jakarta : P3AI-PTU, 1985.
- Undang-Undang Sisdiknas N0. 20 Tahun 2003, Jakarta: Sinar Grafika, 2003